PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP

KINERJA PENYIDIK PADA KANWIL DJP JAWA BARAT I

(Studi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan)

**Dani Rahmat**1)

NPM. 188010036

**1Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Pasundan**

**Bandung, Jawa Barat, Indonesia**

***destinataris@gmail.com***

ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Kinerja Penyidik Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I diduga belum berjalan secara efektif. Hal ini diduga disebabkan oleh Implementasi Kebijakan Akses Informasi Keuangan yang belum dilaksanakan secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey explanatory*, dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melakukan pola hubungan atau sebab akibat antara nilai suatu variabel (variable dependen) jika nilai variabel yang lain berhubungan dengannya (variable independen). Berdasarkan hasil penelitian secara simultan bahwa dapat dijelaskan bahwa Implementasi Kebijakan memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap Kinerja Penyidik Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I (82,3%). Artinya Implementasi Kebijakan sangat dominan dan dapat menentukan terhadap tercapainya kinerja Kinerja Penyidik Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.. Disamping itu pula bahwa peneliti menemukan bahwa Kinerja Penyidik Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan semata, tetapi ada variabel lain yang juga ikut mempengaruhinya (17,7%), seperti antara lain sikap pelaksana kebijakan akses informasi keuangan dari pihak lembaga jasa keuangan. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial bahwa Implementasi Kebijakan melalui dimensi-dimensinya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Penyidik Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian yang menggambarkan bahwa implementasi kebijakan yang diukur melalui dimensi ukuran dan tujuan kebijakan (9,70%), sumber-sumber kebijakan (26,80%), ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksanan (6,20%), komunikasi antar organsiasi terkait dan kegiatan pelaksanaan (19,20%), sikap para pelaksana (17,30%) dan lingkungan eksospol (3,10%) berpengaruh cukup signifikan terhadap Kinerja Penyidik Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, walaupun secara menyeluruh belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi pada kinerja penyidik. Adapun pengaruh yang paling besar adalah dimensi Sumber-sumber kebijakan (26,80%) , sedangkan pengaruh yang paling kecil adalah dimensi Lingkungan eksospol (3,10%).

**Kata kunci**: Implementasi kebijakan dan Kinerja Penyidik

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Revisi. Bandung: Alfabeta.

Akib, Haedar. 2010. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Mengapa.” Jurnal Administrasi Publik 1(1):1–11.

Alamsyah, Kamal. 2005. Reformasi Administrasi Republik Indonesia. Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan.

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsini. 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Budianto, A. Aji Tri dan Amelia Katini. 2015. “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sbu Distribusi Wilayah I Jakarta.” KREATIF | Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang 3 No. 1(Oktober 2015).

Dharma, Agus. 2004. Perilaku Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga.

Dwiyanto, Agus & Bevaola. 2006. Ringkasan Kebijakan (Policy Brief). Centre Population and Policy Studies. Yogyakarta : UGM.

Gunadi. 2017. Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: MUC Consulting Group.

Hasibuan, S. P, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. cetakan kesepuluh. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.

Kristiyanti, Mariana. 2012. “Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen.” Majalah Ilmiah INFORMATIKA 3 NO. 3(September 2012):103–23.

Marpaung, P. M. 2015. Advokasi Kebijakan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara, 2010. Kajian Kebijakan Publik, LAN. Jakarta : Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan.

Nugroho, Riant. 2004. Public Policy : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2016. Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2018. Public Policy. Edisi Revisi ke-6. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (terj. cet. 3). Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Prawirosentono, Suyadi. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.

Rewansyah, Asmawi. 2010. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance. Jakarta: Yusaintanas Prima.

Riduan dan Sunarto. 2011. Pengantar Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Ruky, Achmad S., 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Satibi, Iwan. 2011. Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Centre For Political and Local Autonomy Studies.

Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas. Jakarta: PT Gunung Agung.

Siagian, Sondang P. 2015. Filsafat Administrasi (edisi revisi). cet-8. Jakarta: Bumi Aksara.

Simatupang, Pantjar. 2003. “Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan.” Analisis Kebijakan Pertanian 1(No. 1):1–21.

Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alphabeta.

Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Administrasi. Edisi Kedua. CV Alfabeta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Ketiga. CV Alfabeta.

Suhartono, Irawan. 2000. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sulistyastuti, Dyah Ratih dan Erwan Agus Purwanto. 2015. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi). cet-2. Jakarta: Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo, Bintoro M.A., 1994. Analisis Kebijaksanaan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional. Majalah Administator. No. 5 & 6 tahun IV.

Wahab, Solihin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Widaningrum, Ambar dan Erna Irawati. 2015. Konsep dan Studi Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.

Zainudin, et al. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. (editor : Arif Zainudin dan D. Mutiarin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DOKUMENTASI

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Direktur Jenderal Pajak. 2015. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 - 2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Hakim MK. 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Jakarta: Panitera Mahkamah Konstitusi.

Haryadi, Ruddy. 2015. Pengaruh Implementasi kebijakan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah “Politea” Volume 14 Nomor 7 Bandung : Universitas Al-Ghifari.

Ruchimat, Mamat. 2010. Pengaruh Implementasi kebijakan dan koordinasi terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas PSDA Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Perum Jasa Tirta II (Disertasi) . Bandung : Universitas Pasundan.

Menteri Keuangan. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Menteri Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2019. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Menteri Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Menteri Keuangan. 2020. “APBN 2020.” Kementerian Keuangan. Diambil 18 April 2020 (https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/).

Pakpahan, Robert. 2019. “Mengenal Rasio Pajak Indonesia.” Diambil 21 Januari 2020 (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/).

Rahmawati, Wimpi. 2014. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Pegawai Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar (Studi Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar). thesis. Bandung : Universitas Pasundan.

Republik Indonesia. 2017 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 1981. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wijayanto, Andi. 2008. “Analisis Korelasi Product Moment Pearson.” Diambil 25 Oktober 2020 (http://eprints.undip.ac.id/6608/1/Korelasi\_Product\_Moment.pdf /).